

AREA IV



PENGUATAN AKUNTABILITAS

KINERJA



1



KETERLIBATAN PIMPINAN

2



**PENGELOLAAN AKUNTABILITAS
KINERJA**

Keterlibatan Pimpinan



Rapat Penyusunan Renstra 2021 - 2024



Rapat Penyusunan Anggaran 2021



Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP 2021

Keterlibatan Pimpinan



Penyusunan Penetapan Kinerja PN Simalungun 2021



Rapat Pleno Bulanan Periode Mei 2021

Keterlibatan Pimpinan



Apel Pagi



Aksi Hakim



Aksi Kesekretarian



Aksi Kepaniteraan

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja



Reviu Renstra PN Simalungun 2020 - 2024



RKT PN Simalungun 2022



PKT PN Simalungun 2021



Reviu IKU PN Simalungun 2020



Rencana Aksi PN Simalungun 2021



LKJIP PN Simalungun 2020

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Jakarta, 15 November 2019
Hal : Penyampaian Dokumen SAKIP

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan Peradilan untuk menyusun dokumen, sebagai berikut:

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rancangan Rencana Strategi Tahun 2020-2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Penyusunan laporan Kinerja Tahun 2019 untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama menggunakan aplikasi e-Sakip Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui website Mahkamah Agung (<https://mahkamahagung.go.id/id/>) dengan memilih aplikasi internal KOMDANAS atau melalui link Komdanas (<http://komdanas.mahkamahagung.go.id/>) dengan menggunakan *username* dan *password* Komdanas masing-masing satuan kerja. Aplikasi e-Sakip Mahkamah Agung diakses pada menu Perencanaan/e-Sakip. *User manual* atau buku panduan aplikasi e-Sakip dapat diunduh dalam aplikasi Komdanas.

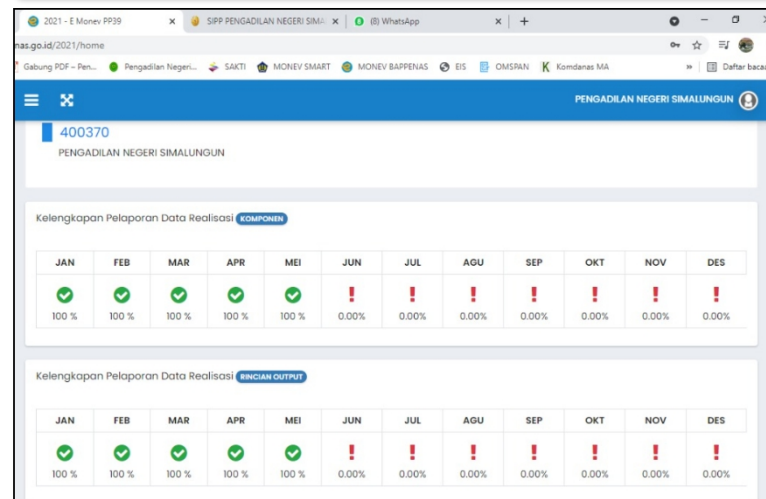
Penyampaian Dokumen SAKIP PN Simalungun

LAPORAN HASIL
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#400370
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

MAHKAMAH AGUNG

MEI 2021



Laporan Monev Bappenas - per Mei 2021

PENGADILAN TINGGI MEDAN
JL. NGUMBAN SURBAKTI NO.38 A - TELP. (061) 88360055, FAX. (061) 88360056
MEDAN (20132)

Nomor : W2.U/ 2332 /RPA.01.10/4/2021
Lampiran : 1 (satu) exp
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2020

Medan, 24 April 2021

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Di
SIMALUNGUN

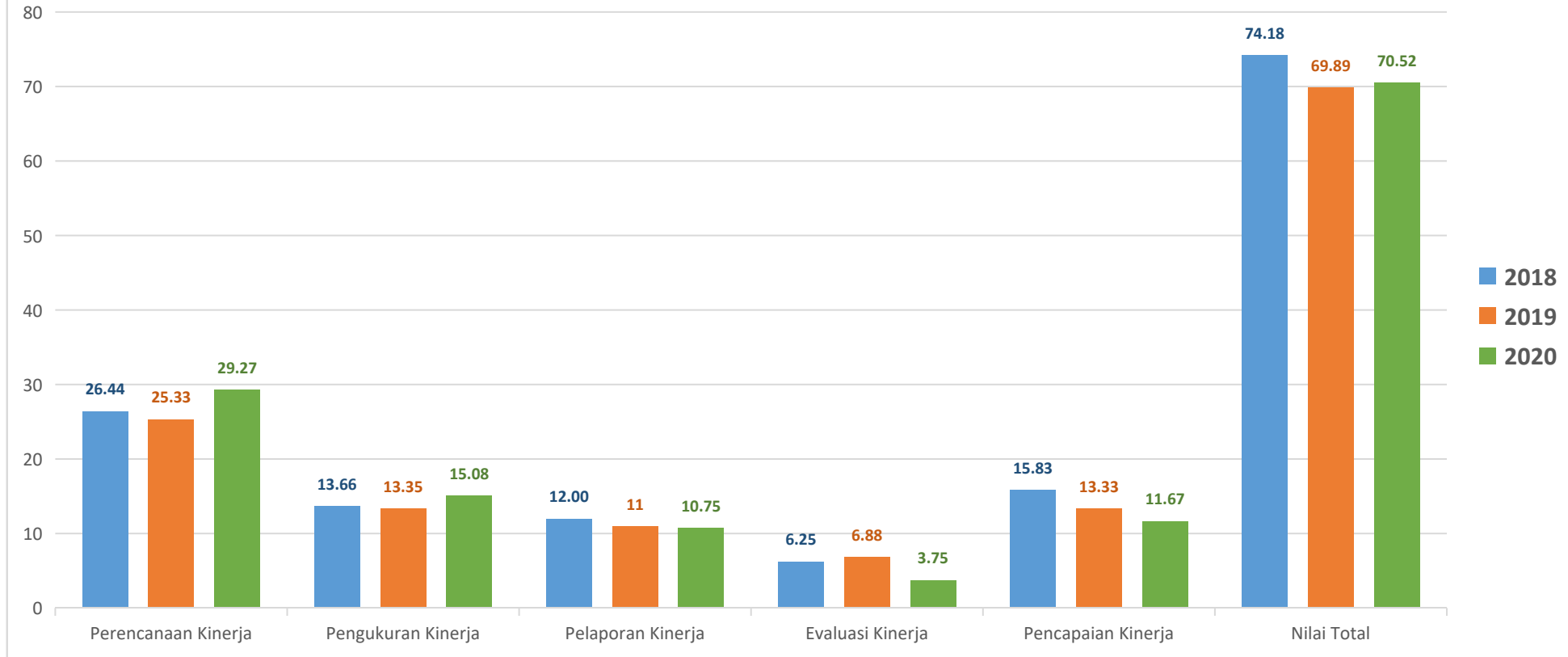
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 28A/SEK/SK/IV/2011 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding seluruh lingkungan Peradilan disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100. Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban "Tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban *a/b/c/d/e*, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan criteria sebagai berikut :

LHE SAKIP dari PT Medan

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Laporan Hasil Evaluasi Pengadilan Negeri Simalungun (2018 - 2020)



Referensi Bobot Penilaian :

- Perencanaan Kinerja = 35%
- Pengukuran Kinerja = 20%
- Pelaporan Kinerja = 15%
- Evaluasi Kinerja = 10%
- Pencapaian Kinerja = 20%

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor: 00002142/PKP/4007/012/LAN-MA/2020

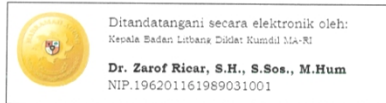
Mahkamah Agung RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan yang berlaku menerangkan bahwa:



Nama : SORAYA RIZNA AFRIZAL,SH
Nomor Identitas : 199110032014032003
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 03 Oktober 1991
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/B
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Instansi : Mahkamah Agung
Kualifikasi : MEMUASKAN
Judul Aksi Perubahan : PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI PADA WEBSITE pn-simalungun.go.id DENGAN BRODI (BROSUR DIGITAL) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

telah memenuhi kompetensi manajerial Jabatan Pengawas pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dari tanggal 13 Juli sampai dengan 02 November 2020 di Bogor selama 830 (delapan ratus tiga puluh) Jam Pelajaran.

BOGOR, 22 DESEMBER 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI
Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum
NIP.196201161989031001

* Dokumen ini ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sesuai UU ITE Pasal 11. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

KOMPETENSI MANAJERIAL, MATA PELATIHAN DAN KEGIATAN

KOMPETENSI MANAJERIAL

- I. **Integritas**
Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi
- II. **Kerja Sama**
Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif
- III. **Komunikasi**
Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal; Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respons yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll
- IV. **Orientasi pada Hasil**
Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja
- V. **Pelayanan Publik**
Mampu menyupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintah/pelayanan publik secara transparan
- VI. **Pengembangan Diri dan Orang Lain**
Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan
- VII. **Mengelola Perubahan**
Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan
- VIII. **Pengambilan Keputusan**
Menganalisis masalah secara mendalam

MATA PELATIHAN DAN KEGIATAN

- I. **Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara**
 1. Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila
 2. Bela Negara Kepemimpinan Pancasila
- II. **Kepemimpinan Pelayanan**
 1. Diagnosa Organisasi
 2. Berpikir Kreatif dalam Pelayanan
 3. Membangun Tim Efektif
 4. Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- III. **Pengendalian Pekerjaan**
 1. Teknik Komunikasi Publik
 2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik
 3. Penyusunan RKA Pelayanan Publik
 4. Pelayanan Publik Digital
 5. Manajemen Mutu
 6. Manajemen Pengawasan
 7. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
- IV. **Aktualisasi Kepemimpinan**
 1. Studi Lapangan Pelayanan Publik
 2. Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik
- V. **Orientasi Program**
 1. Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
 2. Overview Kebijakan Pelatihan
 3. Dinamika Kelompok
 4. Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan
- VI. **Evaluasi Pembelajaran**
 1. Evaluasi Substansi
 2. Evaluasi Studi Lapangan
 3. Evaluasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik
 4. Evaluasi Sikap Perilaku



Sertifikat Diklat Kepemimpinan Pengawas dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM



TERIMA KASIH

